



NEGARA ISLAM DEMOKRASI SAMPAI OTOKRASI

Meifa Adinda Erwina

UIN Imam Bonjol Padang

Erman

UIN Imam Bonjol Padang

Radhiatul Hasnah

UIN Imam Bonjol Padang

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk LintahPadang

Korespondensi penulis : erwina0510@gmail.com

Abstrak. *This research aims to analyze the factors influencing the transformation of governance systems in majority-Muslim countries, focusing on the relationship between history, religion, and socio-political contexts in shaping the diverse governance systems. The political dynamics in majority-Muslim countries reflect the variety of governance systems influenced by historical, religious, cultural, and geopolitical factors. Some countries like Indonesia, Tunisia, and Senegal have successfully built full or transitional democracies, enabling active public participation in decision-making processes. In contrast, countries like Saudi Arabia and the United Arab Emirates maintain autocratic structures based on Sharia law as the basis of legitimacy. The method used is qualitative research with a library research approach, where various sources of information such as books, academic journals, and official reports are reviewed to understand the differences in governance systems from democracy to autocracy. The results of the study show that, despite the diversity in the application of governance systems, many Muslim-majority countries are striving to manage power while responding to social, economic, and public needs, either through fair elections or socio-economic reforms. This research is expected to provide insights into the challenges and opportunities in the journey towards stable and inclusive governance in majority-Muslim countries.*

Keywords: *Islamic, Democracy, Autocracy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi transformasi sistem pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim, dengan fokus pada hubungan antara sejarah, agama, dan konteks sosial-politik dalam membentuk sistem pemerintahan yang bervariasi. Dinamika perpolitikan di negara-negara mayoritas Muslim mencerminkan keragaman sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, agama, budaya, dan geopolitik. Beberapa negara seperti Indonesia, Tunisia, dan Senegal berhasil membangun demokrasi penuh atau transisional, yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mempertahankan struktur otokratis yang didasarkan pada hukum syariah sebagai dasar legitimasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), di mana berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal akademik, dan laporan resmi dikaji untuk memahami perbedaan sistem pemerintahan dari demokrasi hingga otokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada keberagaman dalam penerapan sistem pemerintahan, banyak negara Muslim berusaha mengelola kekuasaan sambil merespons dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan rakyat, baik melalui pemilu yang adil maupun reformasi sosial-ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan dan peluang dalam perjalanan menuju pemerintahan yang stabil dan inklusif di negara-negara mayoritas Muslim.

Kata Kunci: Islam, Demokrasi, Otokrasi

PENDAHULUAN

Dinamika perpolitikan di negara-negara mayoritas Muslim mencerminkan keragaman pengalaman sejarah, sosial, dan agama yang menghasilkan berbagai sistem pemerintahan (Dahtiar, 2024). Beberapa negara berhasil menerapkan model demokrasi dengan tingkat keterbukaan politik yang relatif tinggi, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi

Received September 30, 2024; Revised Oktober 30, 2024; Desember 10, 2024

** Meifa Adinda Erwina, erwina0510@gmail.com*

aktif dalam pengambilan keputusan melalui pemilu yang adil dan transparan (Cahyaningsih et al., 2022). Sebaliknya, sejumlah negara mempertahankan struktur otokratis yang menempatkan kekuasaan di tangan elit tertentu atau penguasa tunggal. Keberagaman ini menunjukkan spektrum sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal.

Spektrum pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim sangat dipengaruhi oleh letak geografis, sejarah kolonial, serta budaya lokal. Demokrasi penuh atau transisional, seperti yang terlihat di Indonesia, Tunisia, dan Senegal, menunjukkan keberhasilan negara-negara ini dalam memadukan modernisasi dengan nilai-nilai lokal (Adiansyah, 2017). Di sisi lain semi demokrasi, seperti di Turki, memperlihatkan keterbatasan sistem demokrasi akibat kontrol pemerintah yang kuat. Sementara itu, negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masih mempertahankan struktur otokratis atau monarki absolut yang berlandaskan hukum syariah untuk legitimasi politik (Fish, 2020).

Sejarah panjang dunia Islam memberikan kontribusi signifikan terhadap dinamika politik di wilayah ini. Pada masa kekhalifahan, otoritas politik dan spiritual berada dalam satu kepemimpinan yang sering kali dianggap ideal dalam konteks Islam. Namun, era kolonial membawa perubahan besar, memaksa negara-negara Muslim untuk mengadopsi sistem pemerintahan sekuler yang menciptakan ketegangan antara tradisi agama dan modernisasi (Sanusi, 2017). Setelah kemerdekaan banyak negara Muslim menghadapi tantangan dalam menemukan keseimbangan antara aspirasi demokrasi dan kebutuhan stabilitas politik yang sering kali mengarah pada pemerintahan otoriter.

Agama Islam sebagai panduan moral dan hukum turut memengaruhi struktur pemerintahan di banyak negara Muslim. Di beberapa negara, seperti Indonesia, nilai-nilai Islam berhasil diintegrasikan ke dalam demokrasi tanpa kehilangan pluralisme dan keterbukaan. Namun, di negara lain, seperti Arab Saudi, hukum syariah digunakan sebagai dasar legitimasi bagi monarki absolut (Dahtiar, 2024). Perbedaan dalam interpretasi dan implementasi nilai-nilai Islam ini menunjukkan bagaimana konteks politik lokal sangat memengaruhi hubungan antara agama dan negara (Khasanah & Paryanto, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perpolitikan di negara-negara mayoritas Muslim, dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi transformasi sistem pemerintahan dari demokrasi menuju otokrasi atau sebaliknya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara sejarah, agama, budaya, dan geopolitik dalam membentuk sistem pemerintahan di negara-negara Islam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam perjalanan menuju pemerintahan yang stabil dan inklusif.

KAJIAN TEORI

Gagasan tentang negara Islam merupakan topik yang sarat akan ragam pandangan dalam bidang akademis, politik, dan keagamaan. Negara Islam, yang didasarkan pada penerapan hukum syariat, dapat mengambil berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari sistem demokrasi hingga otokrasi. Perbedaan bentuk ini sering kali ditentukan oleh interpretasi terhadap teks-teks keagamaan, dinamika sejarah, serta realitas sosial-politik yang melatarbelakanginya. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis teori-teori fundamental tentang negara Islam serta mengeksplorasi kaitannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otokrasi.

Defenisi Negara Islam

Negara Islam merujuk pada sebuah sistem pemerintahan yang mendasarkan hukum dan kebijakannya pada syariat Islam sebagai pedoman utama. Al-Mawardi menjelaskan bahwa tujuan

utama negara Islam adalah untuk menjaga stabilitas agama, menciptakan keteraturan sosial, dan memastikan kesejahteraan masyarakat (Lismanto & Utama, 2020). Sementara itu, Fazlur Rahman menekankan bahwa negara Islam harus berfungsi sebagai wadah untuk menegakkan keadilan sosial dengan berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, negara Islam tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum syariat, tetapi juga pada terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai ajaran Islam (Maizal Efendi et al., 2024).

Negara Islam dan Demokrasi

Negara Islam yang demokratis adalah sistem pemerintahan yang berupaya menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam sistem ini, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi elemen penting, bersama dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pelaksanaan pemilu yang adil sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan (Kurnia, 2021). Prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan bersama, dijalankan seiring dengan nilai-nilai demokrasi, sehingga tercipta harmoni antara hukum syariat dan aspirasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Beberapa poin penting terkait negara Islam demokrasi adalah:

1. Konsep Syura: Syura (musyawarah) adalah dasar penting dalam sistem demokrasi Islam. Dalam al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38. Allah memerintahkan umat Islam untuk bermusyawarah dalam urusan duniawi.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara : Menurut Yusuf al-Qaradawi, negara Islam demokrasi menjamin hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan hak ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat
3. Pemerintahan yang Bertanggung Jawab : Dalam pandangan Rashid al-Ghannushi, negara Islam yang demokratis adalah yang memberikan kontrol kepada rakyat untuk memantau kinerja pemerintah melalui mekanisme yang transparan.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Penerapan demokrasi atau otokrasi dalam negara Islam memiliki dampak yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, terhadap stabilitas politik serta perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat (Nia sholihah & Yumitro, 2022). Negara Islam yang mengadopsi prinsip demokrasi cenderung lebih inklusif, memberikan ruang bagi partisipasi publik, dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan modern, seperti globalisasi dan inovasi teknologi. Sebaliknya, negara otokratis sering kali menghadapi risiko konflik internal, terutama karena kurangnya ruang untuk perbedaan pendapat dan akomodasi terhadap keberagaman. Hal ini dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi, serta menciptakan ketidakstabilan dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis dinamika politik di negara-negara mayoritas Muslim (Dewi, 2024). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan pengkajian berbagai sumber informasi, termasuk buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan resmi, dan dokumen lainnya yang relevan dengan

topik penelitian (Gea Aprilyada et al., 2023) Fokusnya adalah memahami konsep-konsep teoretis serta fakta empiris terkait spektrum pemerintahan dari demokrasi hingga otokrasi, dengan mempertimbangkan peran sejarah, agama, dan geopolitik dalam membentuk sistem politik. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola utama, perbedaan, dan kesamaan di antara berbagai negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Variasi Sistem Pemerintahan di Negara di Mayoritas Muslim

Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki ragam sistem pemerintahan yang mencerminkan keragaman sejarah, budaya, dan sosial mereka. Beberapa negara, seperti Indonesia, Tunisia, dan Senegal, telah berhasil membangun demokrasi penuh atau transisional yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik (Hasan et al., 2024). Pemilu yang bebas dan adil menjadi mekanisme utama dalam memastikan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Sistem ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai demokrasi modern, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat berpadu dengan prinsip pluralisme politik (Kamuli et al., 2023).

Di sisi lain terdapat negara-negara mayoritas Muslim yang menerapkan sistem semi-demokrasi di mana elemen demokrasi seperti pemilu tetap berjalan, tetapi kontrol pemerintah masih kuat. Turki adalah salah satu contoh di mana proses pemilu tetap dilakukan, namun sering kali diwarnai dengan pembatasan kebebasan media dan pengaruh besar dari elit penguasa (Panggabean et al., 1970). Model ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan stabilitas politik sambil tetap memberikan ruang terbatas bagi keterlibatan rakyat. Hal ini menunjukkan adanya spektrum pemerintahan yang fleksibel di dunia Islam, tergantung pada konteks sosial-politik setiap negara.

Ada beberapa negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mempertahankan sistem otokrasi atau monarki absolut. Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat pada keluarga kerajaan atau elit tertentu, dengan legitimasi yang sering kali didasarkan pada hukum Islam (Ummah, 2019). Struktur pemerintahan seperti ini memberikan stabilitas politik yang kuat, tetapi sering kali membatasi ruang bagi partisipasi rakyat. Meski demikian, negara-negara ini berupaya mengimbangi keterbatasan politik dengan menerapkan reformasi di bidang sosial dan ekonomi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Variasi sistem pemerintahan ini mencerminkan beragam pendekatan negara-negara Muslim dalam mengelola kekuasaan dan memenuhi aspirasi rakyatnya (Santika, 2014).

Maka negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan beragam sistem pemerintahan, mulai dari demokrasi penuh seperti di Indonesia, Tunisia, dan Senegal, hingga semi demokrasi seperti di Turki, serta otokrasi atau monarki absolut seperti di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Meskipun sistem pemerintahan ini bervariasi, masing-masing negara berusaha mengelola kekuasaan dan merespons dinamika sosial-politik dengan cara yang sesuai dengan konteks budaya, sejarah, dan tuntutan zaman, baik melalui pemilu yang adil maupun reformasi di bidang sosial dan ekonomi.

Peran Islam Dalam Struktur Pemerintahan

Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan struktur pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim, dengan pengaruh yang bervariasi tergantung pada konteks politik dan sosial masing-masing negara. Di negara-negara dengan sistem demokrasi, seperti Indonesia, Islam diterapkan dalam cara yang lebih terbuka dan inklusif (Latip Kahpi et al., 2024). Di Indonesia, nilai-nilai Islam dapat berpadu dengan prinsip pluralisme, menghormati keberagaman agama, serta kebebasan politik. Negara ini berhasil mengintegrasikan ajaran Islam dalam kerangka demokrasi, menjaga keseimbangan antara agama dan politik dengan menjunjung

tinggi hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara bebas dan adil (JASMINE, 2014).

Di negara-negara dengan pemerintahan otokratis seperti Arab Saudi, peran Islam lebih menonjol sebagai dasar legitimasi pemerintahan. Di Arab Saudi, hukum syariah menjadi pijakan utama dalam mengatur sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini menjadikan agama bukan hanya sebagai aspek kehidupan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kekuasaan monarki. Di sini, interpretasi terhadap syariah berfungsi sebagai landasan yang mengikat, memastikan stabilitas politik serta mendukung struktur kekuasaan yang terpusat pada keluarga kerajaan (Zayyadi, 2014).

Interpretasi lokal terhadap Islam memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana agama diterapkan dalam struktur pemerintahan. Sementara negara-negara demokratis lebih cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan mengakomodasi nilai-nilai agama dalam konteks modern, negara-negara otokratis sering kali mengandalkan interpretasi yang lebih konservatif dan ketat. Perbedaan dalam cara agama diterapkan menunjukkan bagaimana konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing negara mempengaruhi penerapan ajaran Islam dalam kehidupan pemerintahan (Konvensional et al., 2024).

Islam memainkan peran yang sangat bervariasi dalam struktur pemerintahan negara-negara mayoritas Muslim, tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya masing-masing negara. Di negara-negara demokratis seperti Indonesia, Islam diterapkan dengan pendekatan inklusif yang mengakomodasi pluralisme dan kebebasan politik, sementara di negara otokratis seperti Arab Saudi, hukum syariah menjadi dasar legitimasi pemerintahan yang terpusat pada keluarga kerajaan. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana interpretasi lokal terhadap Islam dapat mempengaruhi penerapan agama dalam sistem politik dan pemerintahan, baik dengan pendekatan yang lebih terbuka maupun konservatif.

Faktor Eksternal dan Internal dalam Dinamika Politik

Faktor internal memainkan peran besar dalam dinamika politik negara-negara mayoritas Muslim, dengan ketegangan sosial, perpecahan etnis, dan gerakan politik berbasis agama yang sering menjadi pemicu perubahan dalam sistem pemerintahan (Panji Prasugi et al., 2024). Ketegangan antar kelompok sosial atau etnis dapat menciptakan ketidakstabilan politik, yang mendorong tuntutan untuk perubahan dalam kepemimpinan atau struktur pemerintahan. Gerakan politik berbasis agama, yang seringkali berakar pada interpretasi tertentu terhadap ajaran Islam, juga berperan dalam mengguncang status quo dan mengarah pada pergeseran politik, seperti yang terlihat dalam berbagai konflik di dunia Islam yang memperjuangkan peran agama dalam kehidupan politik (JASMINE, 2014).

Di sisi eksternal, pengaruh negara adidaya atau hubungan geopolitik dapat memberikan dampak signifikan terhadap struktur politik dalam negara-negara mayoritas Muslim (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Sebagai contoh dukungan Amerika Serikat terhadap beberapa negara monarki di Timur Tengah sering kali memperkuat rezim otoriter, dengan memberikan bantuan militer dan ekonomi yang memungkinkan stabilitas pemerintahan yang bersifat otokratis. Selain itu, pengaruh kekuatan besar lain, seperti Rusia atau Tiongkok, juga dapat memengaruhi kebijakan domestik dan geopolitik negara-negara tersebut, baik melalui aliansi strategis maupun melalui tekanan untuk mengikuti kebijakan tertentu.

Gerakan rakyat, seperti yang terjadi pada Arab Spring mencerminkan dorongan kuat dari dalam masyarakat untuk menuju pemerintahan yang lebih demokratis, meskipun hasilnya bervariasi di setiap negara. Beberapa negara mengalami perubahan yang signifikan dalam sistem politik mereka, sementara yang lain kembali ke otoritarianisme setelah periode transisi. Gerakan ini menunjukkan bahwa dinamika politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, tetapi juga oleh kesadaran kolektif rakyat yang mendambakan perubahan menuju sistem yang lebih adil dan representative.

Transformasi Politik dan Tantangannya

Transformasi politik di negara-negara mayoritas Muslim sering kali mencerminkan pergulatan antara keinginan untuk perubahan dan tekanan yang datang dari berbagai arah. Peristiwa seperti Arab Spring menjadi simbol perjuangan rakyat untuk mencapai demokrasi, terutama di negara-negara dengan pemerintahan otoriter. Gelombang protes ini menunjukkan adanya aspirasi besar masyarakat untuk mendapatkan hak-hak politik, kebebasan, dan akuntabilitas dari pemerintah (Habibi, 2017). Namun, transisi menuju demokrasi di banyak negara terbukti sangat sulit, sering kali terhambat oleh dinamika internal seperti perpecahan sosial dan kurangnya dukungan institusional yang memadai untuk perubahan sistemik.

Salah satu tantangan utama dalam transformasi politik adalah resistensi dari kelompok elit penguasa yang memiliki kepentingan besar dalam mempertahankan status quo. Di banyak negara, elite ini memegang kendali atas sumber daya ekonomi dan alat kekuasaan, sehingga memiliki kemampuan untuk menahan perubahan yang mengancam posisi mereka (Bariroh & M. Anas Fakhruddin, 2021). Hal ini menciptakan situasi di mana reformasi politik berjalan sangat lambat, atau bahkan terhenti sama sekali. Stabilitas politik yang rapuh juga menjadi faktor penghambat, karena kekhawatiran akan konflik internal sering digunakan sebagai alasan untuk menunda demokratisasi.

Di beberapa negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, reformasi lebih difokuskan pada aspek ekonomi dan sosial, seperti diversifikasi ekonomi, penguatan hak-hak perempuan, atau modernisasi infrastruktur. Meskipun langkah-langkah ini membawa perubahan positif bagi masyarakat, struktur politik yang otoriter tetap dipertahankan. Transformasi di bidang ekonomi dan sosial sering kali dijadikan alat untuk meningkatkan legitimasi pemerintah tanpa mengubah mekanisme kekuasaan yang terpusat.

Hal ini mencerminkan pendekatan pragmatis yang lebih berorientasi pada stabilitas daripada demokratisasi di negara-negara tersebut. Transformasi politik di negara-negara mayoritas Muslim mencerminkan perjuangan yang kompleks antara aspirasi rakyat untuk demokrasi dan kendala yang muncul dari dinamika internal maupun eksternal. Meskipun ada dorongan kuat untuk perubahan, seperti yang terlihat dalam Arab Spring, banyak negara menghadapi hambatan berupa resistensi elit penguasa dan kebutuhan akan stabilitas politik. Sebagai hasilnya, reformasi sering kali lebih terfokus pada aspek ekonomi dan sosial tanpa mengubah struktur politik yang otoriter. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi politik di kawasan tersebut cenderung pragmatis, dengan prioritas pada stabilitas, meskipun aspirasi demokrasi tetap menjadi harapan sebagian besar masyarakat.

Arah Masa Depan Sistem Pemerintahan di Negara Islam

Masa depan sistem pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim sangat dipengaruhi oleh tekanan globalisasi yang semakin intensif. Globalisasi membawa berbagai tantangan dan peluang, seperti meningkatnya arus informasi, modernisasi ekonomi, dan ekspektasi rakyat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis. Beberapa negara seperti Indonesia dan Tunisia, telah menunjukkan kemajuan dalam memperkuat demokrasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan modern. Namun, tantangan seperti korupsi, rendahnya partisipasi politik, dan konflik internal masih menjadi hambatan utama yang harus diatasi untuk mencapai stabilitas politik jangka panjang (Abdillah, 2021).

Negara-negara dengan sistem otoriter seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, terus menghadapi tekanan domestik dan internasional untuk melakukan reformasi. Reformasi yang dilakukan cenderung bersifat parsial, seperti diversifikasi ekonomi dan peningkatan hak-hak sosial, tanpa menyentuh struktur politik yang otoriter. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas politik dan mempertahankan legitimasi pemerintah di mata rakyat. Meski demikian, perubahan di bidang sosial dan ekonomi tetap menjadi langkah strategis dalam merespons tuntutan masyarakat yang semakin modern dan berpendidikan.

Keberhasilan sistem pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim akan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka menyeimbangkan antara modernisasi, nilai-nilai Islam dan kebutuhan rakyat. Modernisasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keunikan budaya dan tradisi Islam agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, pendidikan politik yang inklusif dan pemberantasan korupsi menjadi kunci utama untuk memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Dengan pendekatan yang tepat, negara-negara Islam memiliki potensi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil, stabil, dan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya (Afifilah, 2024).

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan di negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan keragaman yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, agama, serta dinamika internal dan eksternal. Meskipun beberapa negara telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan demokrasi modern, tantangan besar seperti korupsi, ketegangan sosial, dan keterbatasan partisipasi politik masih menghambat proses menuju stabilitas politik jangka panjang. Negara-negara dengan pemerintahan otokratis, meskipun melakukan reformasi terbatas di sektor sosial dan ekonomi, seringkali masih mempertahankan struktur kekuasaan yang terpusat. Masa depan sistem pemerintahan di negara-negara Islam akan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menyeimbangkan modernisasi dengan nilai-nilai tradisi Islam serta memenuhi tuntutan rakyat terhadap pemerintahan yang lebih inklusif dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2021). Aktualisasi Islam dan Keindonesiaan Dalam Koteks Ideologi Negara Pancasila. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4(1), 260–274. <https://doi.org/10.47313/jkik.v4i1.1100>
- Adiansyah, R. (2017). Persimpangan Antara Agama dan Budaya. *Intelektualita*, 6(2), 303.
- Afifilah, A. (2024). DI QATAR DAN MAROKO (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah). *Thesis*.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Rekonstruksi Kedudukan dan Fungsi DEWAN PERWAKILAN DAERAH Dalam Parlemen Indonesia*.
- Bariroh, L., & M. Anas Fakhruddin. (2021). Political Entrepreneurship di Madura (Studi tentang Kuasa Aktor dalam Demokratisasi Lokal). *JRP (Jurnal Review Politik)*, 11(2), 175–206. <https://doi.org/10.15642/jrp.2021.11.2.175-206>
- Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. (2022). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov*, 1(1), 1–34. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.5048>
- Dahtiar, A. R. dan. (2024). Causa Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik. In *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (Vol. 2, Issue 11).
- Dewi, F. (2024). The Dynamics and Challenges of Religious Moderation in Muslim Majority Countries in Southeast Asia. *Journey-Liaison Academia and Society*, 3(1), 32–42. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS>
- Fish, B. (2020). *KAUM TUA DAN KAUM MUDA: TRANSFORMASI SOSIAL DALAM NOVEL*

- BANA>T Al-RIYA>D} Karya Raja>' 'Abd Alla>h al-S}a>ni'* (Vol. 2507, Issue February).
Gea Aprilyada, Muhammad Akbar Zidan, Nurlia, Risna Adypon Ainunisa, & Widi Winarti. (2023). Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 165–173.
- Habibi, M. (2017). Identity Politics in Indonesia. In *Affifilah, Arfad* (Vol. 1, Issue March). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16590.66887>
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., & Salsabila, R. F. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional JIMA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keberadaan Konstitusi Sebagai Sumber Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- JASMINE, K. (2014a). ADAT, AGAMA DAN DEMOKRASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERSPEKTIF BUDAYA MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT. In *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- JASMINE, K. (2014b). Ketegangan antar kelompok sosial atau etnis dapat menciptakan ketidakstabilan politik, yang mendorong tuntutan untuk perubahan dalam kepemimpinan atau struktur pemerintahan. Gerakan politik berbasis agama, yang seringkali berakar pada interpretasi tertentu. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 06(01), 1–6.
- Kamuli, S., Latare, S., Sahi, Y., PPKn, P., Ilmu Sosial, F., Negeri Gorontalo, U., Sosiologi, J., & Negeri Gorontalo Correspondence Author, U. (2023). Implikasi Konflik Partai Politik Terhadap Paradigma Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024 Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 3158–3170. <https://jim.usk.ac.id/sejarah>
- Khasanah, I. L., & Paryanto, P. (2023). Simbiosis Harmoni: Islam dan Politik dalam Masyarakat Kontemporer. *Kutubkhanah*, 23(1), 82–98. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v23i1.22942>
- Konvensional, B., Studi, S., Sosiologi, A., Islam, H., Hulaify, A., & Kmr, G. N. (2024). *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih*. 2(1), 161–175.
- Kurnia, Y. R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3612–4246.
- Latip Kahpi, M., Syahbana Siregar, A., & Romadhon Sahr. (2024). Dinamika Komunikasi Politik

- Islam: Narasi dan Dampak dalam Konteks Politik Kontemporer. *Hikmah*, 18(1), 1–130.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/5653>
- Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416–433.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>
- Maizal Efendi, M. Rafi Dhaifullah, Badri Badri, Wismanto Wismanto, Nursyafna Nursyafna, & Rifka Andriani. (2024). Pendidikan Siyash Syari'iyah Dalam Perspektif Islam. *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(2), 133–151. <https://doi.org/10.59246/aljihris.v2i2.777>
- Nia sholihah, N. R., & Yumitro, G. (2022). Relevansi Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun Terhadap Isu Ekonomi Dan Politik Di Yordania. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(2), 100–120. <https://doi.org/10.24042/tps.v18i2.13947>
- Panggabean, S. R., Alam, R. H., & Ali-Fauzi, I. (1970). The Patterns of Religious Conflict In Indonesia (1990-2008). *Studia Islamika*, 17(2). <https://doi.org/10.15408/sdi.v17i2.461>
- Panji Prasugi, D., Agung Banyu Perwita, A., & Risdhianto, A. (2024). Strategi AS yang Gagal dalam Pembangunan Negara Irak Setelah Jatuhnya Saddam Hussein. *Journal on Education*, 06(02), 14211–14220.
- Santika, I. G. N. (2014). pendidikan kewarganegaraan problematika hasil perubahan UUD 1945 secara konseptual. In *CV. Global Aksara Pers* (Issue 1).
- Sanusi, D. A. (2017). Pemikiran Politik Islam. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
- Ummah, M. S. (2019). DEMOKRASI DAN MONARKI. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Zayyadi, A. (2014). REFORMASI HUKUM DI TURKI DAN MESIR (Tinjauan Historis-Sosiologis). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(1), 147–174.
<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i1.1402>